

**PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KOTA MALANG DENGAN MENGGUNAKAN
ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN, EFEKTIVITAS DAN
EFISIENSI
(Studi Kasus Pada Kantor BKAD Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

AKUNTANSI



Oleh:

YOHANA DOMINGGAS UN

2018110106

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi

FAKULTAS EKONOMI

MALANG

2022

**Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Dengan
Menggunakan Analisis Rasio Kemandirian, Efektivitas Dan Efisiensi
(Studi Kasus Pada Kantor BKAD Kota Malang)**

Yohana Dominggas Un¹ Ahmad Mukoffi² Poppy Indrihastuti³
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribhuwana
Tunggadewi Malang
E-mail : yoriu849@gmail.com

ABSTRAK

Tingkat pengukuran terhadap sistem kinerja finansial sangat dapat dikatakan sebagai sebuah hal yang jauh lebih terpenting untuk dapat dilakukan untuk dapat melihat pada tingkat dalam mencapai sebuah pelaksanaan sebuah misi yang sudah dilakukan pada sebuah kelompok atau organisasi serta pada tingkat sebuah hasil dalam sebuah tindakan atas pengukuran yang mana akan dapat memberikan sebuah tindakan atas motivasi serta sebuah arahan demi masa depan yang jauh lebih efektif. Sebagaimana pada hasil riset ini yang dapat diketahui bahwa tingkat keahlian terhadap sistem kerja terhadap keuangan PDK yang berada di Kota Malang periode 2017-2020 apabila dapat diketahui berlandaskan pada sebuah rasio kemandirian yang masih dalam bentuk konsiuslatif, yang mana dapat didefinisikan minim, yang mana disebabkan karena dalam sistem peranan yang ada pada pihak pemerintah pusat dengan tujuan untuk dapat memaksimalkan sistem pembangunan yang ada di Kota Malang jauh lebih baik dan tingkat kemandirian pada lapisan masyarakat untuk dapat membangun sebuah daerah dalam melakukan pembayaran retribusi serta perpajakan dapat dinyatakan masih minim. Adapun diketahui bahwa sebuah rasio efektivitas dalam kemampuan sebuah daerah Kota Malang yang mana dapat melakukan sebuah realisasikan pendapatan asli daerah pada periode 2017-2020 sebagaimana dengan sebuah target yang akan diterapkan sebagaimana berlandaskan pada sebuah data yang riil. Dapat dilihat berlandaskan pada sebuah rasio efisiensi serta sistem kinerja pada pemerintah Kota Malang dalam periode 2017-2020 dinyatakan baik

Kata Kunci : *Pengukuran Kinerja, Rasi Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu otonomi NKRI sebagaimana telah dituangkan dalam UU Tahun 2014 No 23 tentang sistem pemerintahan yang berada di daerah dalam melakukan sebuah tindakan pengurusan sebuah pemerintahan yang mana berlandaskan pada asas otonomi serta salah satu tugas yang akan membantu dengan berbagai mekanisme sebagaimana berlandaskan pada NKRI telah diadakan sebuah tindakan atas perubahan diperbaharui dengan Undang-undang Tahun 2022 No 1 yang mana akan berkaitan dengan korelasi finansial antara pihak pemerintah yang berada di pusat serta pihak pemerintahan yang berada di sebuah daerah yang mana merupakan sebuah tindakan dalam menciptakan sebuah alokasi sumber daya yang secara nasional dalam aspek keterbukaan serta akuntabel.

Hubungan terhadap adanya UU yang ada akan secara langsung akan melibatkan sebuah tindakan atas pergeseran paradigma dalam melakukan sebuah sistem pemerintahan yang serunya desentralisasi yang akan pula dilambungkan dengan tindakan atas pemberian otonomi yang secara nyata terhadap pajak daerah. (Astuti, 2015) menyatakan bahwa apabila dalam melakukan sebuah tindakan dalam mengelola sistem pemerintahan daerah sangat membutuhkan sebuah tindakan atas penilaian dalam melihat apakah sistem pengelolaan finansial apakah sudah secara baik atau belum dengan akan dapat menilai sebuah sistem kerja terhadap sebuah tindakan atas finansial yang ada pada sebuah daerah.

Pengukuran terhadap sebuah tindakan atas kerja dapat dijadikan pertimbangan atau memperbaiki sebuah tindakan atas sistem kinerja finansial yang

akan dapat dipahami selama ini serta dapat pula dikatakan sebagai sebuah pandangan yang baik serta dapat pula dipergunakan untuk dapat melihat dengan berbagai mekanisme finansial. (Nur Ida Iriani, 2021) yang menyatakan bahwa situasi finansial yang akan dapat memberikan sebuah tindakan atas penilaian pada sistem kinerja finansial terhadap sebuah usaha yang mana akan dapat ditinjau kemandirian serta perimbangan secara efisien.

Dalam melihat tingkat keahlian sebuah sistem pemerintahan pada sebuah daerah yang mana akan dapat melakukan sebuah sistem otonomi daerah, sehingga perlu dilaksanakan sebuah tindakan untuk dapat mengukur sistem kinerja finansial pada sebuah daerah. Salah satu tindakan untuk dapat melihat sistem kinerja finansial ialah dapat dilihat berlandaskan pada sebuah tindakan analisis rasio pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisa terhadap sebuah rasio pada anggaran pendapatan belanja daerah sangat dibutuhkan untuk dapat melihat pada tingkat keefektifan terhadap otonomi sebuah daerah, yang mana seharusnya dapat dibutuhkan untuk meningkatkan sistem kinerja finansial pada sebuah daerah. Pada riset ini sebuah rasio yang akan dipergunakan ialah analisis pada rasio finansial yang bersumber dari pada sebuah rasio kemandirian, efektifitas serta pada efisiensi.

Pada dasarnya sebuah rasio kemandirian pada sebuah daerah ialah untuk secara langsung dapat mengetahui pada tingkat keahlian sebuah finansial sebuah daerah dengan tujuan untuk dapat membiayai serta pengeluaran sebuah daerah ialah sejauh mana tingkat kontribusi terhadap setiap PAD. Pada total PAD dan beberapa

PAD serta pada tingkat keefektifan sebuah target dalam sistem perencanaan pada sebuah tindakan realisasi (Sularso, 2011).

Tujuan dari sebuah rasio efektivitas ialah untuk dapat melihat serta dipergunakan untuk dapat mengukur pada tingkat kemampuan sebuah pemerintah untuk dapat memobilisasi sistem penerimaan terhadap sebuah pendapatan yang mana berlandaskan pada sebuah target. (Mahmudi, 2011 : 171). Adapun sebuah rasio efektivitas bertujuan untuk dapat melihat serta dapat menggambarkan sebuah pemerintah untuk dapat melakukan sebuah tindakan atas pengumpulan sumber penghasilan pada APBD yang menjadi sebuah target. (Rahmayati, 2016) menyatakan bahwa sistem pemerintahan daerah akan bisa untuk melakukan sebuah tugas apabila sebuah rasio akan digapai mencapai 100% atau angka 1 maka secara langsung akan meningkat terhadap rasio aktivitas sehingga sistem kinerja akan lebih baik. Adapun sebuah tujuan dari rasio efektivitas ini ialah untuk dapat melihat sejauh mana tingkat efisiensi yang dimiliki oleh pemerintah untuk dapat merealisasikan sebuah penghasilan semakin kecil, berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Mahmudi, 2011 : 171).

Pemerintah Kota Malang dapat diartikan sebagai salah satu daerah yang memiliki otonomi daerah dengan tujuan ialah dalam melakukan APBD yang ada pada Kota Malang, yang akan berpatokan pula pada Permendagri pada Tahun 2006 No 13 yang mana akan diawali dengan sebuah penetapan atas kebijakan KUA yang secara langsung akan dapat menjabarkan sebuah kebijakan dengan tujuan untuk mampu mendorong sistem anggaran pada sebuah pemerintah serta tugas dalam sebuah pelayanan yang diberikan terhadap lapisan masyarakat akan dapat didorong

dengan berbagai jenis sumber dari sebuah daerah. Dalam sebuah sistem pengelolaan yang mana berlandaskan pada Undang-Undang No 23 tahun 2014 yang akan berkaitan dengan sistem pemerintahan daerah merupakan sebuah ukuran yang sangat mendasar dalam sebuah tindakan penyelenggaraan sistem pemerintahan serta pada aspek demokrasi, disamping itu juga tingkat potensi terhadap keanekaragaman yang sudah dituangkan dalam UU serta akan dapat bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan tetapi bukan terhadap pimpinan negara dalam hal ini Presiden RI serta adanya tingkat kepastian terhadap sistem pelaksanaan sistem pemerintahan yang mana akan dapat diawasi berlandaskan pada lapisan masyarakat yang akan dilalui pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sebagaimana yang dituangkan dalam latar belakang, sehingga dalam riset ini peneliti tertarik untuk melakukan sebuah riset dengan topik “Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Dengan Menggunakan Analisis Rasio Kemandirian, Efektivitas, Dan Efisiensi”.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang dituangkan dalam latar belakang, sehingga dalam riset ini rumusan masalah yang akan diangkat ialah bagaimana pengukuran KKP (Kinerja Keuangan Pemerintah) yang berada di Kota Malang dengan menggunakan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas serta rasio efisiensi pada tahun 2017 sampai 2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang dituangkan dalam rumusan masalah, sehingga dalam riset ini tujuan penelitian yang akan diangkat ialah untuk dapat mengetahui pengukuran KKP (Kinerja Keuangan Pemerintah) yang berada di Kota Malang dengan menggunakan analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas serta rasio efisiensi pada tahun 2017 sampai 2020

1.4 Manfaat Penelitian

Sebagaimana yang dituangkan dalam tujuan penelitian yang ada, sehingga dalam riset ini manfaat penelitian yang akan diangkat ialah :

1. Manfaat Teoritis

Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah, secara teori untuk dapat memperluas pola pikir serta wawasan dan penambahan terhadap referensi terhadap riset-riset yang akan datang, yang mana akan berkaitan dengan ilmu akuntansi

2. Manfaat Akademis

Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah, untuk dijadikan sebuah kajian dalam memberikan sebuah konseptual terhadap riset yang akan datang, disamping itu juga akan selalu diharapkan untuk dapat mengembangkan pemahaman pendidikan diwaktu yang akan datang

3. Manfaat Praktis

Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah untuk dijadikan sebuah acuan pada KAD untuk dapat mengukur sistem kinerja finansial yang efektif yang mana akan dapat berkaitan kinerja keuangan sehingga dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerjanya.

1.5 Batasan Penelitian

Akan selalu diharapkan dari riset ini ialah untuk dapat melancarkan sebuah problem yang dihadapi :

1. LK APBD yang mana akan dapat diamati adalah sebuah LRA Badan Keuangan serta Aset Daerah (BKAD) tahun 2017 sampai 2020
2. Sistem kinerja finansial yang dimiliki oleh daerah, sehingga dalam riset ini dijadikan sebuah tindakan untuk dapat mengukur keefektifan berlandaskan pada rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi.
3. Daerah yang diamati adalah BKAD yang berada di Kota Malang

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, W. (2015). Analisis pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap pengangguran dan kemiskinan (studi pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa periode 2007-2011). *Ebank*, 6(1), 1-18.
- Amin, H. (2019). Analisa pengukuran kinerja pada pelayanan jasa taksi puskopau menggunakan metode performance primn (studi kasus: poskopau pekanbaru) (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2010). *"Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah"*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, B. D. (2011). Pengukuran Kinerja Organisasi dengan Pendekatan Balanced Scorecard pada RSUD Kabupaten Kebumen. *JDM (Jurnal Dinamika Manajemen)*, 2(1).
- Hariyanti, D., Marheni, & Yenfi. (2017). *"Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2010-2015"*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis Dan Keuangan STIE-IBEK*, 10 (November), 48–59.
- Hasan, Pupung Puad. (2017). *"Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat)"*. *Jurnal Wacana Kinerja*, Vol.17, Edisi 2.
- Hasanah, N., & Vidiyastutik, E. D. (2018). *"Analisis Kinerja Realisasi Anggaran dalam Belanja Daerah Pemerintah Probolinggo"*. *Jurnal Ecobuss*, 6 (September), 26–35.
- Kartika, D., & Kusuma, I. (2015). *"Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi"*. *Jurnal Akunida ISSN 2442-3033 Vol.1No.2*.
- Kartoprawiro, S., & Susanto, Y. (2018). *"Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas"*. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 16(1), 1–14.
- Mahsun, M. (2019). *"Konsep Dasar Penganggaran: Penganggaran Sektor Publik"*. <http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/ekap4403-penganggaran-sektor-publik/#tab-id-3>
- Maisyuri. (2017). *"Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe"*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 51.
- Mailangkay, P. P., Murni, S., & Rate, P. V. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 8(3) Akuntansi
- Marlianita, Y., & Saleh, S. A. (2020). *"Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Tingkat Pembiayaan SILPA Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat"*. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 25–35.

- Nordiawan, D. (2018). *"Akuntansi Pemerintahan"*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nur Ida Iriani. (2021). Kinerja Keuangan Ditinjau dari Perimbangan Kemandirian, Perimbangan Efektivitas, Perimbangan Efisiensi dan Perimbangan Pertumbuhan Pada Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Vol.9, No.1, 2021*
- Nurhayati, N. (2015). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu. *Cano Ekonomos, 4(1), 55-66*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah legalitas pembentukan dan operasional SKPD
- Puspitasari, A. F. (2012). "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2007-2011". *Jurnal Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Eka Cida, 1(1)*.
- Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. *Negara Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. 2014. "Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah".
- Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2011). "Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah". *Media Riset Akuntansi, Vol.1*.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, 7, 81-92*.
- Suranta, S., Perdana, H. D., & Syafiqurrahman, M. (2017). "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan". *Jurnal Akuntansi, 5(2), 111-124*.
- Tarmizi, R., Khairudin, K., & Jayadi, A. (2014). "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum dan Setelah Memperoleh Opini WTP". *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 5(2)*.
- Yusuf, A. M. (2016). *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan"*. Prenada Media. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.